

BAB IV KESIMPULAN

Dalam penelitian ini kita dapat melihat tindakan yang diambil oleh aktor non-negara dapat berpengaruh dalam proses pembuatan keputusan sebuah negara ataupun organisasi internasional. Human Rights Watch telah menjalankan berbagai macam strategi dalam proses advokasi terkait pelanggaran HAM di Myanmar pada tahun 2020-2022.

Berdasarkan analisa terhadap strategi advokasi yang dilakukan oleh HRW dalam penegakan HAM di Myanmar pada tahun 2020-2022 menggunakan konsep TAN. HRW telah menggunakan keempat strategi advokasi berdasarkan konsep TAN. *Information politics*, dan *symbolic politics* dalam membangun isu dan menarik perhatian publik terkait pelanggaran HAM di Myanmar melalui publikasi laporan-laporan tahunan dan berita seputar kondisi HAM di Myanmar serta keterlibatan dalam aksi pita merah. Menekan Myanmar menggunakan *leverage politics*. HRW menggunakan *accountability politics* untuk terus mengingatkan Myanmar terkait kesepakatan mereka untuk menyelesaikan permasalahan HAM mereka melalui kesepakatan dalam UPR 2015.

Strategi yang paling sering digunakan HRW adalah *information politics* dan *leverage politics*. Penggunaan strategi tersebut ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan urgensi agar isu di Myanmar menjadi prioritas dalam diskusi di dunia internasional. Selain itu penggunaan strategi tersebut juga merupakan salah satu cara yang efektif dalam memberikan tekanan pada Junta Myanmar. Dalam upaya-upaya advokasi HRW juga bisa kita lihat adanya *boomerang pattern* yang terjadi, dari bagaimana NGO lokal seperti AAPP, Mekong Watch, dan lainnya melalui informasi yang disampaikan kepada HRW untuk memberikan tekanan kepada Myanmar.

Berdasarkan lima tahapan pengaruh yang ada dalam konsep TAN seperti: pembentukan isu dan pengaturan agenda, pengaruh terhadap posisi diskursif negara atau organisasi internasional, pengaruh terhadap prosedur internasional, pengaruh terhadap perubahan kebijakan yang diambil oleh “*target actors*”, dan pengaruh terhadap perilaku negara. Pengaruh dari strategi-strategi advokasi yang dilakukan

oleh HRW telah mencapai tahap tiga yaitu adanya perubahan terhadap prosedur internasional. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana strategi HRW mempengaruhi Junta Militer Myanmar untuk mengambil keputusan membentuk prosedur pengembalian pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk pulang ke Myanmar yang disebut 'Pilot' program.

Sedangkan untuk tahap keempat dan kelima yaitu perubahan kebijakan dan perubahan perilaku negara belum tercapai. Meskipun sanksi telah dijatuhkan kepada Myanmar sebagai tanggapan atas kudeta militer dan pelanggaran HAM. Hal ini tidak menghentikan Junta Myanmar dalam melakukan pelanggaran HAM. Faktor yang menyebabkan tidak adanya perubahan kebijakan dari Myanmar ini adalah tindakan dari dunia internasional yang tidak kolektif dimana beberapa negara seperti Cina dan Rusia tidak berusaha mengambil sikap yang tegas kepada Myanmar terkait pelanggaran HAM yang dilakukannya. Ditambah tidak adanya respon tegas dari ASEAN sebagai organisasi regional dalam menekan Myanmar untuk menghentikan pelanggaran HAM yang dilakukannya.

